

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

DEA RICHA FRIMAETHA

NPM : 155310771

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DEA RICHA FRIMAETHA
NPM : 155310771
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30% yaitu 27% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

/Pekanbaru, 07 Agustus 2020
Ketua Program Studi Akuntansi


Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseuruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Yang memberi pernyataan,



Dea Richa Frimaetha

155310771

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,



Dea Richa Frimaetha
155310771



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi atau memfotocopy data keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan disajikan dalam skripsi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Salah satunya tidak membuat jurnal penyesuaian untuk aset tetap dan aset lancar. Sehingga perlu disempurnakan agar Penerapan Akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tersebut dapat dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

ABSTRACT

The Office of the Election Commission of Pekanbaru City is one of the accounting entities under the State Ministry / Institution that is obliged to hold accounting and accountability reports for the implementation of the State Revenue Budget by preparing financial reports. This study aims to determine the suitability of the application of accounting in the Analysis of Application of Accounting in the Election Commission of the City of Pekanbaru with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

This research was conducted in the financial section of the Pekanbaru City Election Commission Office, the types and sources of data are primary data and secondary data, data collection techniques, namely by interviewing and documenting or photocopying financial data of the Pekanbaru City Election Commission Office. In the preparation of this study, the authors used a descriptive method by comparing practice with existing theories, then drawn a conclusion presented in the thesis.

From the results of this study it was concluded that the Application of Accounting in the Office of the Election Commission of Pekanbaru City has not fully referred to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. One of them does not make adjusting journals for fixed assets and current assets. So it needs to be improved so that the Application of Accounting in the Office of the Election Commission of Pekanbaru City can be implemented and evaluated in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis yang tertuang dalam skripsi ini dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru**. Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar memperoleh sarjana Ekonomi Prodi Akuntansi Pada Fakultas Eknomi Universitas Islam Riau.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis sangat banyak mendapat dorongan, bimbingan/arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Terimakasih untuk keluarga tercinta, Ayahanda Afrizal dan Ibunda Darmawati serta Kakak dan Abang saya Lestari Frimaetha dan Attar Midzi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi dan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.

4. Ibu Yusrawati, SE., M.Si, Selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak Dodi Setiawan, SE selaku Kassubag Umum Keuangan dan Logistik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Kak Mimi selaku operator Saiba, Kak Lia selaku bendahara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan data-data kepada penulis yang berkaitan dengan penelitian ni.
7. Terimakasih untuk sahabat terbaik yang selalu ada, Annisa Amelia,, Cindy Ayu Pratiwi, Ernida Herawati, Nurul Nabila, Putri Acri Rizkiana Ulya Suci, Shafira Amalia Ramadhani, Thalia Amanda Putri dan Randa Saputra.
8. Terimakasih juga untuk teman seperjuangan seluruh mahasiswa/mahasiswi akuntansi angkatan 2015, Indah Shaputri, Tifa Ramadhani , Alghi Faisya Rinaldi, Syauqi Adithya Gusdio, Veggy Annisa A'Rahma, Muhammad Jeffri dan masih banyak teman-teman yang lainnya lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

Dea Richa Frimaetha
155310771



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

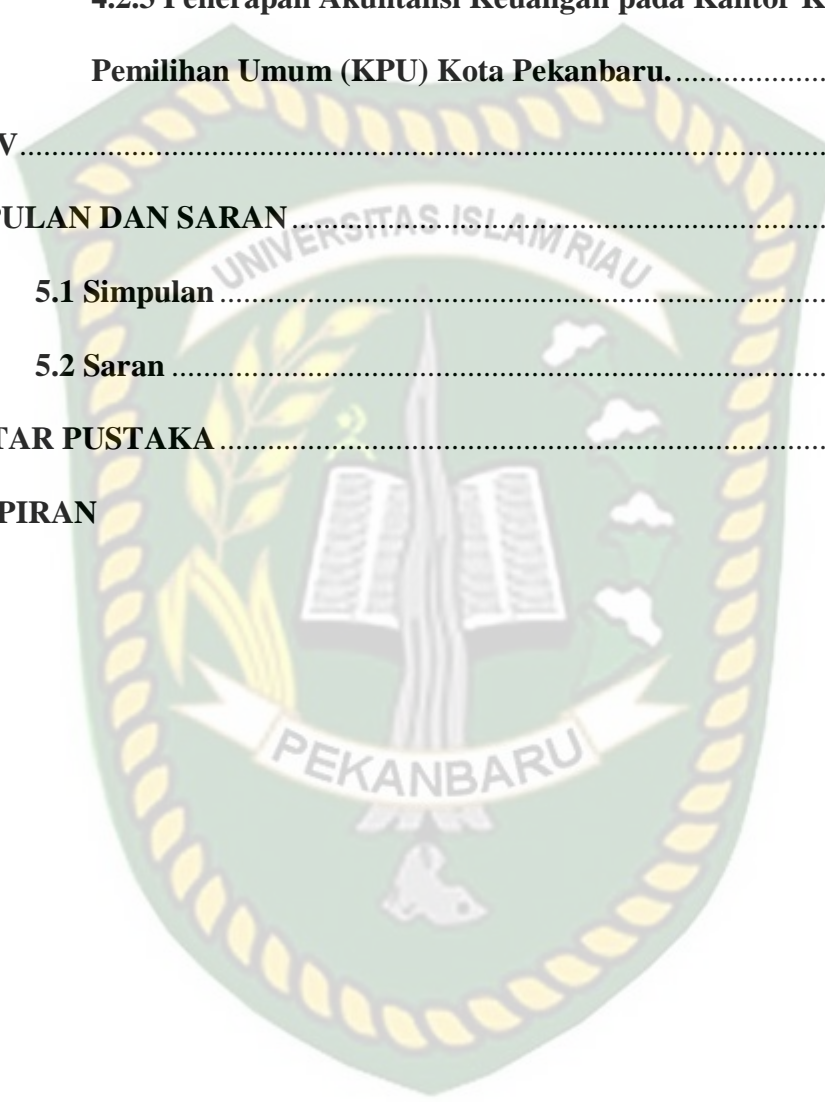
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi	11
2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi	13
2.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	14
2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	14

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP Berbasis Akrual Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	16
2.1.6 Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Perusahaan (Komersial).....	17
2.1.7 Tujuan dan Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah ...	19
2.1.8 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	21
2.1.9 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah	21
2.1.10 Elemen-elemen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	22
2.2 Hipotesis.....	29
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Kantor KPU Kota Pekanbaru	32
4.1.1 Struktur Organisasi.....	34
4.2 Hasil Penelitian.....	35
4.2.1 Dasar Pencatatan Akuntansi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	35

4.2.2 Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.....	36
4.2.3 Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.....	39
BAB V.....	55
SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Buku Kas Umum.....	40
Tabel 4.2	: Jurnal Penerimaan Kas.....	41
Tabel 4.3	: Jurnal Pengeluaran Kas.....	41
Tabel 4.4	: Jurnal Umum.....	42
Tabel 4.5	: Buku Besar.....	44
Tabel 4.6	: Neraca Saldo.....	45
Tabel 4.7	: Kertas Kerja.....	47
Tabel 4.8	: Laporan Saldo Anggaran Lebih.....	50
Tabel 4.9	: Laporan Arus Kas.....	51

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4.2	: <i>Flowchart</i> Penerimaan Kas.....	37
Gambar 4.3	: <i>Flowchart</i> Pengeluaran Kas.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 2 : Neraca Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 3 : Laporan Operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 4 : Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 5 : Neraca Percobaan Ekuitas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 6 : Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 7 : Buku Kas Umum Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
- Lampiran 8 : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah secara umum berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan tersebut, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas pemerintahan. Tugas pemerintah yang paling utama adalah dalam hal pengurusan keuangan negara yang mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Oleh karena itulah, rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara diperlukan pengelolaan anggaran.

Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian atau lembaga adalah untuk memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada dibawah organisasi kementerian atau lembaga terkait. Memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan kelembagaan dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan kelembagaan. Dasar hukum pertanggungjawaban UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sekarang telah diubah menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Menurut Yustisia (2007:166), agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian maka setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya berupa laporan keuangan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit kerja dibebankan serta untuk menghindari adanya informasi yang kurang jelas dari masing-masing unit mengenai pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu laporan juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk menilai tingkat perkembangan, keberhasilan dan kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu entitas akuntansi Kementrian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi

Pemerintah (No 71 tahun 2010) merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas penyampaian laporan keuangan yang bertujuan agar terlihat bahwa kegiatan yang dibiayai dengan anggaran dan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terbagi menjadi dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Seiring dengan adanya reformasi dibagian keuangan menyebabkan perubahan prinsip akuntansi pemerintah yang semula *cash basis* menjadi *accrual basis*. Sistem *cash basis* adalah mencatat kejadian/transaksi ketika arus kas masuk dan keluar telah dilakukan (diterima/dibayarkan). Sistem *accrual basis* adalah mencatat semua kejadian/transaksi pada saat transaksi itu terjadi, sehingga memungkinkan melihat adanya potensi arus kas masuk dan keluar

walaupun uang/kas belum diterima atau dibayarkan. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jendral Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus adanya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam siklus akuntansi keuangan daerah, yaitu: Pertama, mendokumentasi transaksi keuangan kedalam bukti transaksi dan melakukan analisis transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data seperti dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasinya. Kedua, menjurnal dengan meringkas data dan mencatat penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran kas. Ketiga, buku besar yang berisi kumpulan rekening dalam laporan keuangan yang mencatat perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening pada akhir periode. Keempat, daftar saldo atau neraca saldo yang merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertai.

Kelima, jurnal penyesuaian yang menggambarkan kondisi keuangan yang wajar pada rekening tertentu pada kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran yang berkenaan. Keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo yang disusun setelah jurnal-jurnal penyesuaian. Ketujuh, membuat laporan keuangan yang menggambarkan tentang

pencapaian kinerja, program dan kegiatan suatu entitas yang nantinya berguna untuk mengambil keputusan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan adapun laporan keuangan yang disusun entitas pemerintahan sebagai informasi adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, membuat jurnal penutup yang biasanya dilakukan setelah diakhir periode anggaran tahunan.

Dengan adanya tahapan akuntansi keuangan daerah diatas dapat pula disusun laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan yang lengkap meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru selaku salah satu satuan unit kerja dan entitas pelaporan pemerintah dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan, dalam hal ini Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2017/2018. Laporan Keuangan tersebut disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Dalam proses penyajian laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Aplikasi SAIBA ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih sering membutuhkan *update* instal aplikasi setiap tahunnya sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan, namun terdapat kendala saat *update* instal

aplikasi yaitu untuk melihat buku besar yang ada di periode sebelumnya tidak dapat diakses kembali.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru dimulai dari transaksi-transaksi yang dicatat kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 7). Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Proses penerimaan kas dimulai dari pengajuan uang persediaan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara), uang persediaan merupakan kebutuhan uang persediaan yang telah disusun oleh bendahara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai operasional kantor, pengajuan uang persediaan dalam bentuk SPM (Surat Perintah Membayar) yang akan dikeluarkan oleh PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) satuan kerja, setelah itu KPPN mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dana langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja, setelah dana diterima lalu dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) (lampiran 8), kemudian bendahara pengeluaran membuat Laporan keuangan Realisasi Anggaran (lampiran 1), yang tiap bulannya dilaporkan oleh bendahara pengeluaran ke KPPN.

Setelah mencatat ke dalam Buku Kas Umum (lampiran 7), selanjutnya diposting ke Buku Besar, proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam Buku Kas Umum ke Buku Besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Selanjutnya membuat Neraca Percobaan (lampiran 5). Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 1), Neraca (lampiran 2), Laporan Operasional (lampiran 3),

Laporan Perubahan Ekuitas (lampiran 4), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (lampiran 6).

Daftar aset tetap yang ada di Komisi Pemilihan Umum peralatan, mesin, kendaraan dan aset tetap lainnya, Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusutan terhadap aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.1.158.295.090. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. KPU Kota Pekanbaru tidak membuat jurnal penyesuaian untuk aset lancar dalam menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Di dalam Laporan Operasional (lampiran 3) terdapat akun beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.130.611.072 yang merupakan penjumlahan dari kenaikan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dan aset lainnya sebesar Rp.130.558.354 dan Rp.52.718.

Di Laporan Perubahan Ekuitas (lampiran 4) tahun 2018 terdapat akun transaksi antar entitas sebesar Rp.15.178.162.829 yang merupakan penjumlahan dari akun ditagihkan ke entitas lain sebesar Rp.12.470.136.584 dan akun transfer masuk sebesar Rp.2.708.026.245 (lampiran 5). Akun ditagihkan ke entitas lain merupakan akun yang berasal dari SPM/SP2D dan akun Transfer masuk berasal dari jurnal aplikasi persediaan SIMAK-BMN.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 laporan keuangan yang belum disajikan oleh KPU Kota Pekanbaru berupa Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih yang merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan Laporan Arus Kas yang merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal : **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Sudah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan PP No 71 Tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya di bidang ilmu akuntansi secara umum dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan akuntansi keuangan pusat.
- c. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian dan sebagai bahan perbandingan di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini disusun menjadi enam bab dan diberi penjelasan dalam masing-masing sub bagian yang terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari berbagai teori kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Struktur

organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, serta membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut *Accounting Principle Board* (APB) dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:36) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Soemarso (2010:4) mengatakan :

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi (perusahaan atau bukan perusahaan) kepada para pemakai informasi yang berkepentingan.

Menurut Hongren dan Harisson (2009:4) mengemukakan :

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut L.M Samryn dan Karsilawati (2012: 8) mengatakan :

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pihak pemakainya.

Menurut James M.reeve (2009:1-9) mengemukakan :

Secara umum, akuntansi (*accounting*) sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi.

Dari beberapa definisi diatas maka akuntansi mengandung tiga hal, yaitu:

1. Akuntansi sebagai pelayanan jasa karena menghasilkan informasi keuangan kuantitatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pembangunan sumber daya baik entitas bisnis maupun nonbisnis dalam perekonomian.
2. Akuntansi sebagai deskriptif/disiplin analisis karena mengidentifikasikan seluruh kejadian dan transaksi aktivitas ekonomi sampai pengukuran, pegklasifikasian dan pengikhtisaran.
3. Akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang perusahaan bisnis atau entitas usaha lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut.

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2008:181) sistem akuntansi adalah :

Merupakan suatu organisasi yang terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.

Menurut Pahala Nainggolan (2007 : 45) sistem akuntansi adalah :

Suatu sistem yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi lembaga serta menyelenggarakan pertanggung jawaban aktiva dan utang lembaga. Sistem akuntansi merupakan suatu kumpulan dari :

1. Dokumentasi atas transaksi-transaksi akuntansi (jurnal, bank, buku besar, dan lain-lain),
2. Sistem prosedur yang ditetapkan untuk semua staf lembaga

Dari pengertian sistem akuntansi diatas dapat diketahui bahwa sistem akuntansi merupakan suatu bagian yang ada di dalam perusahaan berupa prosedur-prosedur sebagai alat untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pihak-pihak interen maupun eksteren didalam suatu organisasi dalam hal mengambil keputusan.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:40), Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Dari pengertian akuntansi keuangan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan daerah mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, serta mengacu kepada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk Laporan Keuangan bagi pihak eksternal dari Pemerintah Daerah.

2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem pencatatan

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.

Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada, pelaporan transaksi ekonomi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Menurut Abdul Halim (2012:44), Terdapat beberapa macam pencatatan yang digunakan yaitu :

1) *Single entry*

Sistem pencatatan ini biasa disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya sebanyak satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas dicatat pada sisi pengeluaran.

2) *Double entry*

Sistem pencatatan ini juga sering disebut dengan tata buku berpasangan. Pencatatan dalam sistem ini ada sisi debit kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan dasar akuntansi.

3) *Triple entry*

Sistem pencatatan ini adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Setiap transaksi yang dicatat pada dua kali pencatatan merupakan *Entry*. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double*) dinamakan menjurnal, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus seimbang.

b. Dasar pengakuan akuntansi daerah

Menurut Abdul Halim (2012:52-55) agar dapat menentukan kapan transaksi dicatat dan digunakan sebagai sistem akuntansi, dasar akuntansi dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Basis kas

Menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas.

2. Basis akrual

Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis kas modifikasian

Mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis akrual modifikasian

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP Berbasis Akrual Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain

mengatur SAP Berbasis Akrua, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrua yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

Basis Akrua adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

Manfaat basis akrua yaitu:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

2.1.6 Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Perusahaan (Komersial)

Menurut Gade Muhammad (2002:28) :

- a. Persamaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Perusahaan
 1. Akuntansi pemerintah maupun akuntansi komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
 2. Keduanya juga merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.

3. Keduanya harus menggunakan sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna.
 4. Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.
 5. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan dibidang ekonomi.
 6. Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
- b. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Perusahaan
- Menurut Gade Muhammad (2002:28) :
1. Dapat dilihat dari segi kegiatan dan tujuan perusahaan komersial dengan organisasi pemerintah. Pada perusahaan komersial, kegiatannya adalah menghasilkan keuntungan, sedangkan organisasi pemerintah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan tidak mendasarkan mencari keuntungan, maka akuntansi pemerintah antara lain tidak menyusun perhitungan laba/rugi.
 2. Dalam akuntansi pemerintah terdapat akuntansi untuk anggaran, sedangkan dalam akuntansi komersial tidak mengenal anggaran.
 3. Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan mendahulukan peraturan-peraturan dari pada substansi kejadian,

sedangkan akuntansi komersial dapat mendahulukan substansi kejadian daripada bentuk formalnya.

4. Akuntansi pemerintah tidak mengenal pemilik modal, ekuitas dana adalah merupakan penyeimbang yaitu selisih antara aset dengan hutang, sedangkan akuntansi komersial mengenal adanya modal pemilik dan setiap perubahannya mencerminkan kekayaan pemilik pada perusahaan tersebut.
5. Dalam akuntansi pemerintah, ekuitas dana tidak dapat dibagikan.

2.1.7 Tujuan dan Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim Abdul (2012:42), Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomik oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi berikut ini:

- a) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b) Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Yang termasuk didalamnya adalah : inspektoral jendral dan BPK.

c) Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun yang lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

d) Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, konsultan, LSM dan lainnya.

e) Rakyat

Rakyat adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa pemerintah daerah.

f) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

g) Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Pemerintah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.8 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Tujuan laporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.9 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Menurut Slamet Sugiri (2008:45) Pengertian siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi yaitu:

- a. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.

- b. Mencatat transaksi kedalam buku jurnal.
- c. Meringkas ke dalam buku besar, transaksi keuangan yang sudah dijurnal.
- d. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
- e. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling *update* (mutakhir)
- f. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).
- g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP.
- h. Menutup buku besar.
- i. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca setelah tutup buku.

2.1.10 Elemen-elemen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Elemen-elemen akuntansi keuangan daerah meliputi :

- a. Analisis Transaksi

Transaksi merupakan bagian yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara.

- b. Jurnal Transaksi

Untuk menjurnal digunakan buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi yang kronologis (urut waktu). Menjurnal

merupakan prosedur mencatat transaksi keuangan dibuku jurnal. Dengan adanya jurnal, pencatatan ke transaksi menjadi lebih mudah, karena jurnal sudah memilah-milah transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan.

c. Buku besar

Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account). Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan operasional, beban, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Proses memasukkan rekeningrekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan posting. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yan terakhir, sehingga dikenal dengan *the book of final entry*.

d. Neraca Saldo

Prosedur penjurnalan dan *posting* dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya yaitu menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Adapun saldo yang diambil angkanya dari saldo terakhir yang ada di setiap transaksi.

e. Jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun guna menghasilkan pengukuran yang tepat antara pendapatan dan

belanja/biaya. Penyesuaian dilakukan pada saat terdapat transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran.

f. Laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) terdiri atas berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a)

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada

tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan perubahan ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan arus kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas

adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

Didalam penelitian yang dilakukan pada Penerapan Akuntansi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi/objek penelitian dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad No. 39, Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer, merupakan data dan informasi yang berasal dari sumber asli. Data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Jenis data sekunder ini antara lain yaitu Buku Kas Umum, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan struktur organisasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

- 1) Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat

guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penerapan akuntansi keuangan daerah.

- 2) Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang diperoleh dari bagian keuangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan yang diringkas dari hasil pembahasan, selanjutnya disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor KPU Kota Pekanbaru

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK2005/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad No. 39, Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Melalui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru diharapkan kualitas dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dapat berjalan sukses, bebas, adil, transparan dan tanpa memihak kepada siapapun.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berkomitmen dengan visi : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.1.1 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru



Penjelasan dari Struktur Organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan tata usaha, administrasi, perlengkapan, kepegawaian serta program atau perencanaan.

2. Kasubbag Program dan Data

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran pemilu, melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu, menyusun data pemilih, dan mengelola bahan kebutuhan pemilu.

3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Mempunyai tugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian keuangan, memberi informasi terpadu menyangkut pengelola keuangan yang menjadi kewenangan KPU, menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran dan menyusun, memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru.

4. Kasubbag Hukum

Mempunyai tugas menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan, menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu dan menyusun, mengelola verifikasi calon anggota DPRD kabupaten/kota.

5. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan, mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Dasar Pencatatan Akuntansi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Untuk menentukan kapan suatu transaksi di catat, dapat menggunakan berbagai basis/dasar akuntansi. Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru basis/ dasar

akuntansi yang digunakan adalah Basis AkruaI dan Basis Kas. Basis Kas yakni pencatatan transaksi dilakukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Basis AkruaI telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) untuk pelaporan financial bagi seluruh entitas pemerintah termasuk entitas pemerintah daerah.

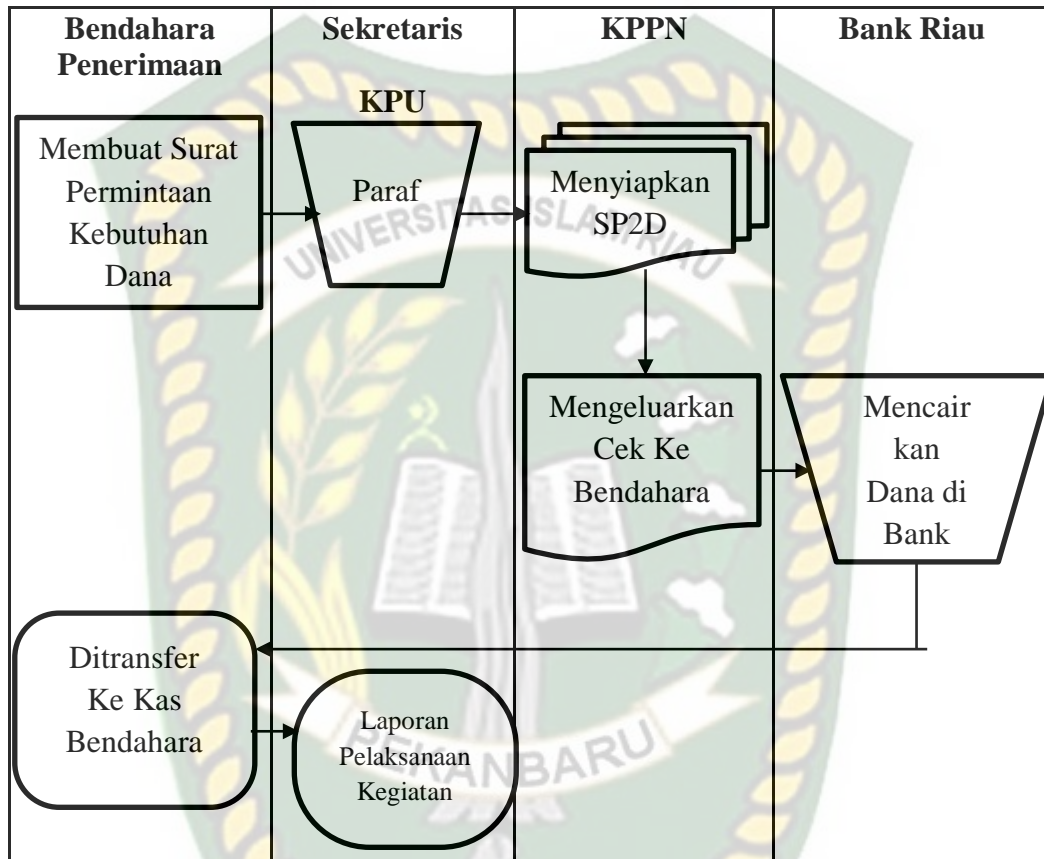
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menggunakan basis kas pada laporan realisasi anggaran (lampiran 1), sedangkan untuk basis akruaI dapat dilihat dalam neraca (lampiran 2), laporan operasional (lampiran 3).

4.2.2 Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

1. Sistem Penerimaan Kas

Sebelum penerimaan kas, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru terlebih dahulu membuat permintaan kebutuhan dana kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN), kemudian KPPN mengeluarkan surat SP2D, lalu KPPN mengeluarkan cek, cek tersebut langsung ditransfer ke rekening bendahara, uang yang didapat dimasukkan ke kas. lalu transaksi penerimaan kas tersebut diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan.

Gambar 4.2
Flowchart Penerimaan Kas
Kantor KPU Kota Pekanbaru



Sumber: Data olahan penulis, 2019

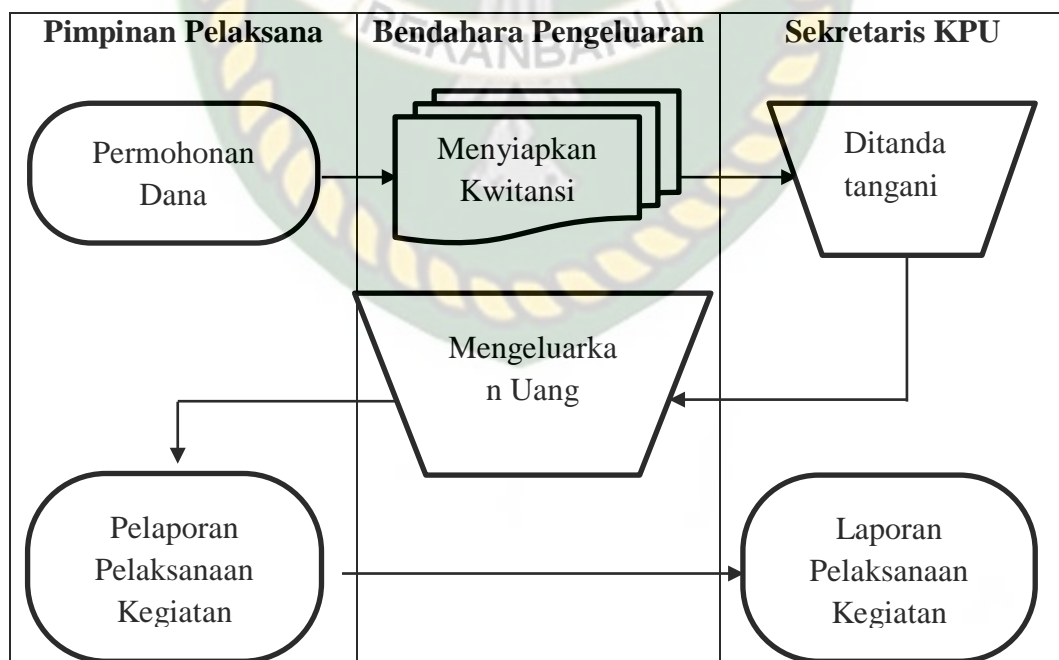
Penjelasan dari Gambar 5.1 yaitu sebelum penerimaan kas dimulai, bendahara penerimaan terlebih dahulu membuat surat permintaan kebutuhan dana. Selanjutnya diperiksa oleh sekretaris KPU Kota Pekanbaru sebelum ditandatangani. Lalu KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) menyiapkan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk mengeluarkan cek ke bendahara penerimaan dan pencairan dana dilakukan oleh Bank Riau. Setelah itu dana telah ditransfer ke kas bendahara yang akan

dipertanggungjawabkan oleh sekretaris KPU Kota Pekanbaru dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

2. Sistem Pengeluaran Kas

Untuk proses pengeluaran kas di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, atasan pemegang kas memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh pemimpin pelaksana. Kemudian pemegang kas mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, setelah itu bendahara mengeluarkan uang dari kas, lalu dibukukan oleh bagian keuangan dan dibuat kertas atau dokumen sebagai bukti atas pengeluaran. kwitansi tersebut nantinya akan diperiksa dan disetujui oleh sekretaris KPU.

Gambar 4.3
Flowchart Pengeluaran Kas
Kantor KPU Kota Pekanbaru



Sumber: Data olahan penulis, 2019

Penjelasan dari Gambar 5.2 yaitu proses pengeluaran kas dimulai dari atasan bendahara pengeluaran yang memberi persetujuan pembayaran permohonan dana yang dilakukan oleh pimpinan pelaksana, lalu bendahara pengeluaran menyiapkan kwitansi atas semua pengeluaran yang terlebih dahulu ditandatangani oleh sekretaris KPU Kota Pekanbaru. Setelah itu bendahara pengeluaran mengeluarkan uang dari kas. Kemudian bendahara pengeluaran membuat bukti atas pengeluaran kedalam laporan pelaksanaan kegiatan yang akan diberikan kepada pemimpin pelaksana dan sekretaris KPU Kota Pekanbaru.

3. Analisis Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Secara keseluruhan *flowchart* penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru yaitu untuk memudahkan pengontrolan uang yang didapatkan dan dikeluarkan, dan untuk memudahkan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang telah diterapkan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.2.3 Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.

Penerapan akuntansi yang dilakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, diawali dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas ke Buku Kas Umum (lampiran 7).

Berikut adalah bentuk Buku Kas Umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru:

Tabel 4.1
Buku Kas Umum
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

Tanggal	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	Pagu Anggaran				15.474.297.000
02-02-2018	Diterima SP2D		50.710.440		
02 Feb 2018	Diterima SP2D		70.151.232		
02 Feb 2018	Diterima SPD2		110.180.000		
05 Feb 2018	Pembayaran Tunjangan Struktural Pejabat Eselon III dan IV			2.345.966	
05 Feb 2018	Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU			59.111.000	
05 Feb 2018	Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS			54.063.870	
	Total		231.041.672	115.520.836	15.589.817.836

Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas Kantor KPU Kota Pekanbaru hanya melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Kantor KPU Kota Pekanbaru menyajikan jurnal *single entry* saat terjadinya transaksi. Seharusnya Kantor KPU Kota Pekanbaru menyajikan jurnal untuk setiap transaksi, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.

1. Tahap Pencatatan Transaksi

Dari transaksi diatas maka akan dibuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.

Tabel 4.2
Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit		Kredit	
			Kas dibendahara pengeluaran	RK Pemerintah Daerah	Serba-serbi	
					Akun	Jumlah
02 Februari 2018	Diterima SP2D		50.710.440	50.710.440		
02 Februari 2018	Diterima SP2D		70.151.232	70.151.232		
02 Februari 2018	Diterima SP2D		110.180.000	110.180.000		
	Total		231.041.672	231.041.672		

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Tabel 4.3
Jurnal Pengeluaran Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit			Kredit
			Tunjangan struktural pejabat eselon III dan IV	Uang kehormatan ketua dan anggota KPU	Tunjangan kinerja PNS	Kas dibendahara pengeluaran
05 Februari 2018	Pembayaran Tunjangan Struktural Pejabat Eselon III dan IV		2.345.966			2.345.966
05 Februari 2018	Pembayaran Uang Kehormatan Ketua da Anggota KPU			59.111.000		59.111.000
05 Februari 2018	Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS				54.063.870	54.063.870
	Total		2.345.966	59.111.000	54.063.870	115.520.836

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Tabel 4.4
Jurnal Umum
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

Tanggal	No. Rek.	Keterangan	Debit	Kredit
02 Feb 2018		Jurnal finansial Kas dibendahara pengeluaran RK pemerintah daerah Jurnal anggaran Tidak ada jurnal (bukan bagian dari transaksi belanja ataupun pendapatan)	50.710.440	50.710.440
02 Feb 2018		Jurnal finansial Kas dibendahara pengeluaran RK pemerintah daerah Jurnal anggaran Tidak ada jurnal (bukan bagian dari transaksi belanja ataupun pendapatan)	70.151.232	70.151.232
02 Feb 2018		Jurnal finansial Kas dibendahara pengeluaran RK pemerintah daerah Jurnal anggaran Tidak ada jurnal (bukan bagian dari transaksi belanja ataupun pendapatan)	110.180.000	110.180.000
05 Feb 2018		Jurnal finansial Beban tunjangan struktural pejabat eselon III dan IV Kas dibendahara pengeluaran Jurnal anggaran Belanja tunjangan struktural pejabat eselon III dan IV	2.345.966	2.345.966

		Estimasi perubahan SAL		2.345.966
05 Feb 2018		Jurnal finansial Beban pegawai Kas dibendahara pengeluaran	59.111.000	59.111.000
		Jurnal anggaran Belanja pegawai Estimasi perubahan SAL (Uang kehormatan ketua dan anggota KPU)_	59.111.000	59.111.000
05 Feb 2018		Jurnal finansial Beban tunjangan PNS Kas dibendahara pengeluaran	54.063.870	54.063.870
		Jurnal anggaran Belanja tunjangan PNS Estimasi perubahan SAL	54.063.870	54.063.870

Sumber : Data olahan penulis, 2019

2. Tahap Penggolongan

Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku Besar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk periode sebelumnya tidak dapat diakses kembali karena telah *update* instal aplikasi ke periode selanjutnya. Setelah melakukan jurnal selanjutnya diposting ke Buku Besar sebagai berikut:

Tabel 4.5
Buku Besar
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru
Februari 2018

Nama Rekening : Kas dibendahara pengeluaran

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
	Saldo Awal				15.474.297.000	
28 Februari	Jurnal Penerimaan Kas		231.041.672		15.705.338.672	
28 Februari	Jurnal Pengeluaran kas			115.520.836	15.589.817.836	

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Nama Rekening : RK Pemerintah Daerah

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
28 Februari				231.041.672		231.041.672

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Nama Rekening :Tunjangan struktural pejabat eselon III dan IV

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
28 Februari			2.345.966		2.345.966	

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Nama Rekening :Uang kehormatan ketua dan anggota KPU

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
28 Februari			59.111.000		59.111.000	

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Nama Rekening :Tunjangan kinerja PNS

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
28 Februari			54.063.870		54.063.870	

Sumber : Data olahan penulis, 2019

3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah membuat Buku Besar, kemudian menyusun Neraca Saldo dan memasukkan nilai buku besar tiap perkiraan akun. Tetapi Kantor KPU Kota Pekanbaru tidak membuat Neraca Saldo. Seharusnya setelah membuat Buku Besar Kantor KPU Kota Pekanbaru harus membuat Neraca Saldo. Neraca Saldo dibuat untuk mengetahui informasi saldo setiap akunnnya dengan cara memposting nilai buku besar ke perkiraan akun serta untuk melihat keseimbangan jumlah debit dan kredit pada Buku Besar.

Tabel 4.6
Neraca Saldo
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru
Februari 2018

No. Rek	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas dibendahara pengeluaran	115.520.836	
	RK Pemerintah Daerah		231.041.672
	Tunjangan struktural pejabat eselon III dan IV	2.345.966	
	Uang kehormatan ketua dan anggota KPU	59.111.000	
	Tunjangan kinerja PNS	54.063.870	
	Jumlah	231.041.672	231.041.672

Sumber : Data olahan penulis, 2019

Jurnal penyesuaian untuk aset lancar

Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tidak melakukan jurnal penyesuaian terhadap aset lancar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ada, dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual diharuskan membuat jurnal penyesuaian. Transaksi yang harus dilakukan penyesuaian adalah transaksi yang meliputi persediaan. Persediaan pada Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru adalah perlengkapan yang merupakan bahan habis pakai.

Jurnal finansial:

Persediaan	Rp. 2.059.751.395	
Kas dibendahara pengeluaran		Rp. 2.059.751.395

Jurnal anggaran:

Belanja modal-persediaan	Rp. 2.059.751.395	
Estimasi Perubahan SAL		Rp. 2.059.751.395

Pencatatan untuk jurnal penyesuaiannya dapat dibuat sebagai berikut :

Jurnal finansial:

Beban persediaan	Rp. 2.059.751.395	
Persediaan		Rp. 2.059.751.395

Jurnal anggaran:

Tidak ada jurnal

Setelah membuat neraca saldo serta jurnal penyesuaian atas persediaan yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Memindahkan saldo di neraca saldo dan penyesuaian ke kertas kerja seperti berikut ini:

Tabel 4.7
Kertas kerja
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Kas di bendahara pengeluaran		2.059.751.395				2.059.751.395				2.059.751.395
Persediaan	2.059.751.395			2.059.751.395						
Belanja modal-persediaan	2.059.751.395				2.059.751.395		2.059.751.395			
Beban persediaan			2.059.751.395		2.059.751.395				2.059.751.395	
Estimasi perubahan SAL		2.059.751.395				2.059.751.395				2.059.751.395
Total	4.119.502.790	4.119.502.790	2.059.751.395	2.059.751.395	4.119.502.790	4.119.502.790	2.059.751.395		2.059.751.395	4.119.502.790
								2.059.751.395	2.059.751.395	

Sumber : Data olahan penulis, 2019

4. Tahap Pelaporan

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sudah membuat Laporan keuangan, namun ada beberapa laporan keuangan yang belum diterapkan di dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru keseluruhan belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Agar lebih jelas, berikut Laporan keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru yang telah dibuat :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disingkat LRA merupakan suatu laporan komponen keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan ekuitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya serta berisikan ikhtisar secara ringkas dan lengkap terhadap pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang berisikan rincian mengenai informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK dan LPE.

Sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru adalah :

a) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. LPSAL dimaksud

untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut :

Tabel 4.8
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Xxx	Xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

Sumber : PP No.71 Tahun 2010

b) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini juga berisikan kas masuk dan kas keluar yang berguna sebagai indikator jumlah kas di masa akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Contoh format Laporan Arus Kas sebagai berikut :

Tabel 4.9
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	2018	2017
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	Penerimaan Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Penerimaan Dana Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	Xxx
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	Xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)	xxx	Xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx

39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	xxx	xxx
44	Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	Xxx
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap lainnya	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	Xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)	xxx	Xxx
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah daerah Lainnya	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	xxx	xxx
63	Bank		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	Xxx
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx

74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	Xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)	xxx	Xxx
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	xxx	Xxx
85	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	Xxx
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PPK)	xxx	Xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	Xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktivita Transitoris (85-88)	xxx	Xxx
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	Xxx
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	xxx	xxx
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	xxx	xxx

Sumber : PP No.71 Tahun 2010

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan standar ini setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Dalam hal ini, seharusnya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru membuat jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas, buku besar,

neraca saldo, jurnal penyesuaian dan selanjutnya menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru masih ada prosedur yang belum diterapkan seperti belum membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas.
2. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tidak membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan dalam bentuk barang habis pakai dan neraca saldo.
3. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tidak menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas.
4. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2 Saran

1. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Seharusnya membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
2. Seharusnya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2010. Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Elsyanora, Wiwied Asti. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Prov. Riau di Kota Pekanbaru. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Riau.
- Halim, Abdul dan Kusufi Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasna, Azizah. 2016. Pengertian Akuntansi, Cabang-Cabang dan Akuntansi Ilmu sosial. <https://www.academia.edu>. Diakses pada 9 Mei 2018.
- Hongren, Charles, T dan Walter Harrison Jr. 2009. Akuntansi Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- James M Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, dkk. 2009. Akuntansi Pengantar 1. Buku 1. Salemba Empat.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. Akuntansi Keperilakuan, Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Mentu, Ezra Paula dan Jullie J. Sondakh. 2016. Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 1, Hal. 1392-1399.
- Rafni, Marisa. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Riau.
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihim. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Samryn, L.M. 2011. Pengantar Akuntansi. Rajawali Pers.
- Sari. 2017. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran pada Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://repository.unpas.ac.id>. Akses pada 8 Juli 2018.
- Soemarso. 2010. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku dua. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Soputan, Cristy, dkk. 2015. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, Hal. 592-600.

- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif. Bandung: Alfabet.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Triantias. 2015. Landasan Teori. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada 8 Juli 2018.
- Zawitri, sari, dkk. 2015. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, Hal.24-44.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Lembaran Negara RI Tahun 2016. Jakarta: KepalaBagian TU Kementerian.
- Presiden Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Perekonomian dan Industri.